

## KONTRIBUSI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH

*Contribution of Bungus Ocean Fishing Port to The Regional Economy*

Oleh:

Desi Tri Rahmadani<sup>1\*</sup>, Iin Solihin<sup>2</sup>, Retno Muninggar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Program  
Pascasarjana IPB University, Bogor 16680, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas  
Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Bogor 16880,  
Indonesia

\*Korespondensi penulis: iin\_solihin@apps.ipb.ac.id

### ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menjadi pusat ekonomi perikanan di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian wilayah Sumatera Barat. Namun demikian, secara empiris kontribusi Pelabuhan tersebut belum diketahui. Hal ini memberikan ketidakjelasan upaya pengembangan pelabuhan perikanan tersebut baik dari sisi pengelolaannya maupun keterkaitannya dengan wilayah sekitar. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menghitung besaran kontribusi PPS Bungus terhadap perekonomian daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yang merupakan pendekatan metodologis yang bertujuan untuk menyajikan dan menginterpretasikan objek penelitian secara objektif dan apa adanya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara kepada semua pelaku usaha di PPS Bungus. Metode pengumpulan data dari responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai ekonomi di pelabuhan perikanan dengan PDRB tingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan nasional. Hasil temuan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan PPS Bungus terdiri dari banyak jenis usaha seperti usaha warung rumah makan, perbekalan kapal, nelayan, *docking* kapal, pengolah, pedagang kaki lima, dan lainnya dengan total pendapatan/tahun sebesar Rp815.256.218.383 dan kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan dan PDRB keseluruhan Kota Padang pada tahun 2024 sebesar 19,55% dan 0,97%.

**Kata kunci:** bungus, ekonomi, kontribusi, pelabuhan perikanan, wilayah

### ABSTRACT

*The Bungus Fishing Port serves as a center for fishery economics in the West Sumatra region and its surroundings, expected to contribute to the regional economy of West Sumatra. However, empirically, the contribution of this port has not yet been determined. In actuality, this data is crucial as a foundation for the development of the fishing port, both in terms of its administration and its interaction with the neighborhood. Therefore, the purpose of this research is to calculate the magnitude of Bungus FP, contribution to the local economy. The method used in this research is a descriptive method, a methodological approach aimed at presenting and interpreting research objects objectively. Data collection was conducted through literature studies, field observations, and interviews with all business actors at Bungus FP. Purposive sampling was used to identify respondents. The data was analyzed using a descriptive comparative method, which involves comparing the economic value at the fishing port with the GDP (Gross Regional Domestic Product) at the level of Padang City, West Sumatra Province, and the National level. The results indicate that economic*

*activities in the PPS Bungus area consist of various types of businesses such as restaurants, ship supplies, fishermen, ship docking, processors, street vendors, and others, with a total annual income of IDR 815,256,218,383. The contribution of PPS Bungus to the Fishery GDP and the overall GDP of Padang City in 2024 is 19.55% and 0.97%, respectively.*

**Key words:** bungus, economy, contribution, fishing port, region

## PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur yang berperan penting dalam perkembangan perikanan tangkap di suatu daerah. Peran pelabuhan mulai dari aspek produksi, pengolahan, sampai ke pemasaran hasil tangkapan (Suherman & Mudzakir, 2022). Kegiatan produksi mulai dari pemenuhan kebutuhan untuk melaut (seperti penyediaan bahan bakar, air, dan es) hingga pembongkaran hasil tangkapan (Alimina *et al.*, 2022). Salah satu Pelabuhan perikanan di Indonesia adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus di Sumatera Barat. Pelabuhan perikanan ini mempunyai potensi besar sebagai pusat perikanan dan memiliki pasokan ikan segar yang melimpah. Hal ini disebabkan Pelabuhan perikanan ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia Barat Sumatera dengan potensi sumberdaya ikan yang besar (Manik *et al.*, 2021).

Pelabuhan Perikanan Sanudera Bungus memiliki potensi ikan pelagis besar dan kecil yang relatif besar karena berhadapan langsung dengan WPPNRI 572. Menurut KEPMEN Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022, perairan ini mempunyai potensi sumberdaya ikan pelagis kecil dan demersal adalah 479.503 ton dan 438.877 ton dan jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan mencapai 431.553 ton dan 219.439 ton, artinya peluang pemanfaatan masih relatif besar.

Secara operasional, produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bungus mengalami peningkatan pada tahun 2019 produksi yang didaratkan mencapai 4.124 ton meningkat menjadi 7.287 ton pada tahun 2023. Demikian pula jumlah kunjungan kapal sebesar 3.118 kapal pada tahun 2023 (PPS Bungus, 2024). Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan, tetapi juga merupakan simpul pertumbuhan ekonomi wilayah yang memberikan dampak pengganda bagi perkembangan sektor sektor lain di wilayah tersebut. Terdapat keterkaitan antara performa pelabuhan perikanan dengan kebijakan pemerintah daerah (Suherman & Mudzakir, 2022) dan keterkaitan aktifitas usaha penangkapan ikan di pelabuhan perikanan dengan pendapatan daerah (Sembiring *et al.*, 2024).

Dalam konteks pelabuhan perikanan, PPS Bungus mempunyai potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan pertumbuhan industri kepelabuhannya. Terlebih bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Sumatera Barat relatif besar, dimana pelabuhan perikanan menjadi penopang utama pengembangan sektor ini. Perikanan merupakan sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan kemiskinan, sehingga dengan adanya PPS Bungus dapat menurunkan angka kemiskinan di wilayah Sumatera Barat (Stanford *et al.*, 2014).

Namun demikian, saat ini besaran kontribusi PPS Bungus terhadap perekonomian wilayah Sumatera Barat belum terpetakan dan teridentifikasi secara ilmiah. Padahal informasi tersebut sangat penting sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menghitung besaran kontribusi PPS Bungus terhadap perekonomian wilayah yang mencakup aktifitas usaha dan nilai ekonomi di PPS Bungus terhadap ekonomi wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini memahami apakah PPS benar-benar memberikan dampak nyata dalam mendukung perekonomian melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, atau pembangunan kapasitas ekonomi. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat strategis baik secara akademis, kebijakan maupun praktis bagi para pengambil kebijakan dalam upaya pengembangan PPS Bungus.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember sampai Februari 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan metode deskriptif survei. Hal ini dilakukan dengan wawancara dan survei kpadresponden. Penentuan responden dilakukan secara *purpose sampling*. Menurut Sugiyono (2010); Wahyuni *et al.* (2018), *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam penelitian ini adalah bahwa responden merupakan orang yang beraktivitas ekonomi di pelabuhan perikanan minimal 1 tahun. Jumlah responden mencakup 52 orang yang terdiri atas 40 nelayan (kapal bagan perahu, pangcing ulur tuna, purse seine, dan pancing tonda), 2 orang pengolah, 5 orang pedagang kaki lima, 2 orang pabrik es, 2 orang galangan yang terdiri dari pemilik dan pekerja. Pertimbangan ini didasarkan kepada kebutuhan data untuk mencapai tujuan penelitian. Misalnya, penelitian dilakukan dengan sampling yang sesuai dengan persyaratan pengambilan sampel yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan yakni pendapatan pelaku usaha (omset) pertahun, gaji/upah karyawan atau pegawai, dan PNBP SDA dan Non SDA PPS Bungus.

Data kontribusi PPS Bungus dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai ekonomi di PPS Bungus dengan pendapatan daerah (PDRB) baik sektor perikanan dan keseluruhannya. Nilai ekonomi Pelabuhan adalah pendapatan yang diperoleh dari seluruh pelaku usaha di Pelabuhan perikanan dan pendapatan Pelabuhan perikanan. Pendapatan Pelabuhan dilihat dari segi PNBP SDA dan Non SDA. Kedua pendapatan tersebut diperoleh dari laporan tahunan pelabuhan perikanan. Pendapatan daerah menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan dan keseluruhan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional. Formula yang digunakan adalah (Putra *et al.*, 2018):

- Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Kota

$$KP = \frac{\text{Nilai ekonomi PPS}}{\text{PDRB Perikanan Kota}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan: KP = Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Kota

- Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Total Kota

$$KPt = \frac{\text{Nilai ekonomi PPS}}{\text{PDRB Total Kota}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan: KPt = Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Total Kota

- Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Provinsi

$$KPr = \frac{\text{Nilai ekonomi PPS}}{\text{PDRB Perikanan Provinsi}} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan: KPr = Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Provinsi

- Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Total Provinsi

$$KPrt = \frac{\text{Nilai ekonomi PPS}}{\text{PDRB Total Provinsi}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan: KPrt = Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Total Provinsi

- Kontribusi PDRB Total Provinsi terhadap PDRB Perikanan Nasional

$$KPrt = \frac{\text{Nilai ekonomi PPS}}{\text{PDRB Total Provinsi}} \times 100\% \quad (5)$$

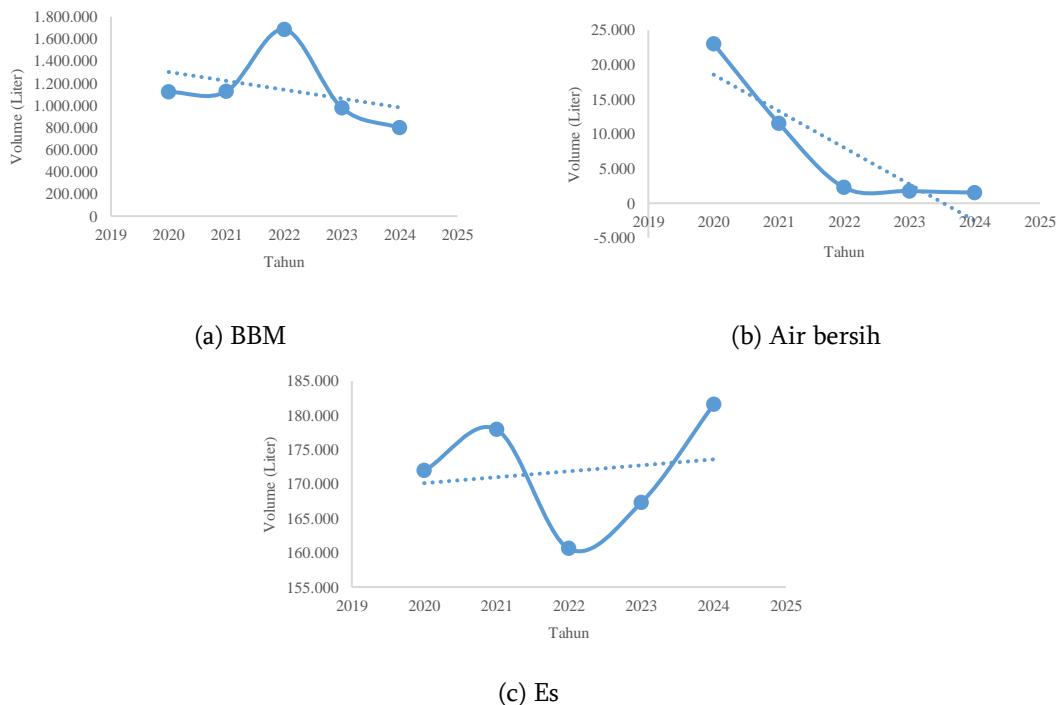
Keterangan: KPn = Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Nasional

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktifitas Ekonomi di PPS Bungus

#### Penyediaan perbekalan melaut

Perbekalan melaut mencakup 3 jenis perbekalan yaitu penyediaan BBM, air bersih dan es. Penyediaan BBM dan air bersih relatif mengalami penurunan, namun penyaluran es mengalami peningkatan. Penurunan penyediaan BBM ini disebabkan oleh menurunnya frekuensi kunjungan dan aktivitas operasional kapal di pelabuhan, sehingga pelaku usaha perikanan cenderung membatasi jumlah perjalanan melaut sebagai upaya efisiensi untuk menekan beban biaya operasional (Fazri *et al.*, 2021). Adapun penurunan penyediaan air bersih disebabkan oleh sistem pendistribusian yang kurang efektif dilihat dari kontribusi penjualan air bersih hanya diperlukan untuk perbekalan melaut yang digunakan oleh kapal perikanan dan ketersediaan sumber mata air tawar yang masih kurang di lingkungan pelabuhan (Kusuma, 2015). Hal lain dengan penyaluran es mengalami peningkatan ini mengindikasikan tidak hanya untuk perbekalan melaut tetapi es digunakan untuk penanganan pasca ikan ditangkap baik saat pendaratan ikan maupun distribusi ikan di pasar. Perkembangan jumlah perbekalan melaut disajikan pada Gambar 1.



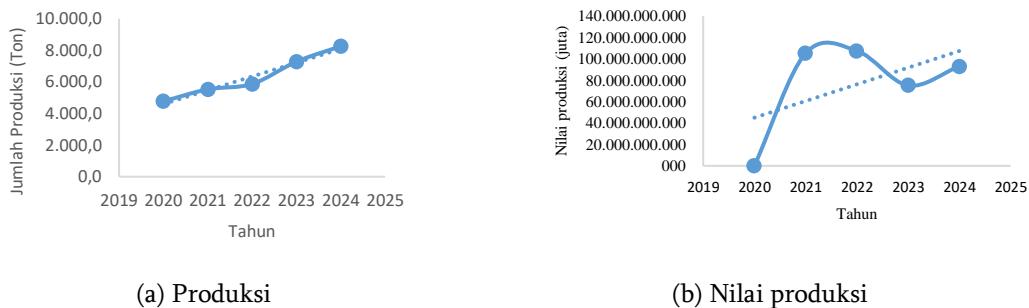
Gambar 1. Penyediaan bahan perbekalan melaut PPS Bungus (2020-2024)

#### Pendaratan hasil tangkapan

Analisis data produksi dan nilai produksi hasil tangkapan PPS Bungus dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya pola yang kontras antara volume dan nilai produksinya. Grafik produksi (a) secara konsisten menunjukkan kenaikan volume tangkapan, dimulai dari sekitar 4.600 ton pada tahun 2020 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya sekitar 8.100 ton pada tahun 2024. Tren positif ini mengindikasikan bahwa kapasitas penangkapan atau ketersediaan sumber daya perikanan di wilayah PPS Bungus memiliki prospek yang baik, sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya yang efektif dalam menjaga keberlanjutan pasokan. Namun, disisi lain, grafik nilai produksi (b) menampilkan fluktuasi yang signifikan: setelah nilai yang sangat rendah pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis menjadi sekitar 105 miliar rupiah pada tahun 2021, diikuti oleh penurunan berturut-turut pada tahun 2022 (sekitar 95 miliar) dan 2023 (sekitar 70 miliar), sebelum sedikit

meningkat kembali pada tahun 2024 (sekitar 85 miliar). Perbedaan mencolok antara tren peningkatan produksi dan volatilitas nilai ini menyoroti bahwa peningkatan volume tangkapan tidak secara otomatis berkorelasi linear dengan peningkatan pendapatan.

Fluktuasi nilai produksi kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika pasar yang kompleks, seperti perubahan harga komoditas perikanan, komposisi jenis tangkapan yang memiliki nilai jual berbeda, efisiensi rantai pasok, atau faktor permintaan dan penawaran eksternal. Penurunan pasca-2022 memerlukan evaluasi strategi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, sejalan dengan pentingnya kontinuitas produksi dan efisiensi operasional (Suprapto, 2023). Jumlah produksi dan nilai produksi mengalami tren positif meningkat yang memiliki potensi pertumbuhan, sehingga penting untuk mengembangkan produksi berkelanjutan dengan tata kelola yang efektif dan teknologi adaptif demi kontribusi regional PPS Bungus. Perkembangan jumlah produksi dan nilai produksi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Produksi dan nilai produksi hasil tangkapan PPS Bungus (2020-2024)

### Jumlah tenaga kerja

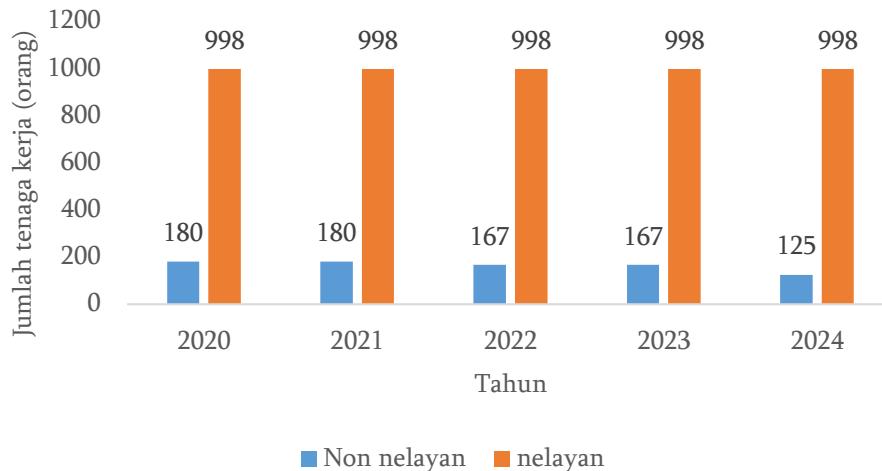
Tenaga kerja (Gambar 3) di PPS Bungus memberikan kontribusi penting dalam penciptaan lapangan kerja. Tenaga kerja di PPS Bungus terbagi menjadi empat kategori utama: nelayan, pedagang ikan, penyedia jasa dan transportasi, serta pekerja di sektor pengolahan ikan. Nelayan merupakan kelompok terbesar yang secara langsung terlibat dalam produksi perikanan tangkap, dengan total 998 orang. Mereka beraktivitas menggunakan berbagai jenis alat tangkap seperti pukat cincin, rawai tuna, pancing tonda, dan lainnya. Jumlah nelayan tersebut relatif tetap dari tahun 2020 sampai 2024 dikarenakan belum adanya peningkatan dari jumlah kunjungan kapal di PPS Bungus. Hal ini berbeda dengan jumlah tenaga kerja non nelayan dimana pada kurun waktu tersebut relatif mengalami penurunan. Jumlah tenaga kerja non nelayan terbanyak terjadi pada tahun 2020 tetapi mengalami penurunan dari 180 orang menjadi 125 orang pada tahun 2024.

Penurunan tersebut diduga disebabkan karena belum berkembangnya aktifitas ekonomi di pelabuhan tersebut. Tenaga kerja non-nelayan tersebar di berbagai instansi seperti Kantor PPS Bungus, lembaga pemerintah dan swasta, serta pekerja lepas di sekitar area pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Bungus tidak hanya menopang industri perikanan inti, tetapi juga sektor jasa dan administrasi kelautan, yang mendukung ekonomi lokal secara keseluruhan. Penurunan jumlah tenaga kerja mengindikasikan penurunan produktivitas berisiko menambah jumlah pengangguran dan mendorong ketimpangan ekonomi. Data tenaga kerja yang beraktifitas di PPS Bungus disajikan pada Gambar 3.

### Industri pengolahan

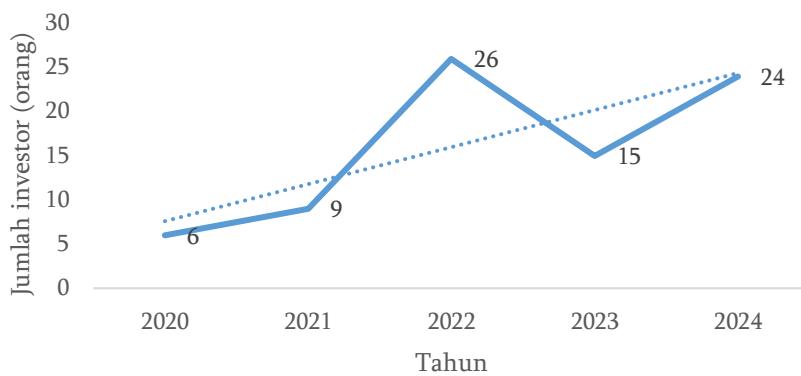
Industri pengolahan di PPS Bungus memiliki peran krusial dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, diversifikasi produk perikanan, serta optimalisasi pendapatan nelayan dan pelaku usaha. Keberadaan fasilitas pengolahan yang memadai, termasuk unit pengolahan ikan (UPI), pabrik es, dan *cold storage*, menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas dan potensi industri di PPS Bungus. Oleh karena itu, industri pengolahan di PPS Bungus tidak hanya berperan sebagai jalur

distribusi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk perikanan. Perkembangan investasi di PPS Bungus menunjukkan tren positif mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah investor tercatat sebanyak 6 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang pada tahun 2021.



Gambar 3. Jumlah Tenaga Kerja Non Nelayan PPS Bungus (2020-2024)

Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana jumlah investor melonjak hingga mencapai puncaknya yaitu 26 investor. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 15 investor, jumlahnya kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 24 investor, menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan komunitas investor di PPS Bungus dengan nilai investasi sebesar Rp293.949.882.937. Jumlah investor di PPS Bungus disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Jumlah Investor di PPS Bungus (2020-2024)

### Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB

#### Pendapatan pelabuhan perikanan (P1)

Data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi menjadi PNBP Sumber Daya Internal (SDA) dan PNBP Non-SDA, serta total keseluruhan PNBP untuk periode lima tahun dari 2020 hingga 2024. Dengan menganalisis tabel ini, kita dapat mengidentifikasi pola perubahan dalam kontribusi masing-masing komponen PNBP (SDA dan Non-SDA) serta memahami dinamika total pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Adapun rekapan PNBP SDA dan Non SDA di PPS Bungus pada tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. PNBP SDA dan Non SDA tahun 2020-2024

Tahun	PNBP SDA* (Rp)	PNBP Non SDA (Rp)	Total (Rp)
2020		1.337.254.763	1.337.254.763
2021		1.144.504.295	1.144.505.440
2022		2.062.922.097	2.062.924.160
2023	79.350	2.646.731.884	2.646.811.234
2024	140.138.395	2.608.458.995	2.748.597.390

PPS Bungus, 2020-2024

\*PNBP SDA baru diberlakukan pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1 tahun 2020-2022, data PNBP SDA mulai diberlakukan pada tahun berdasarkan Permen KKP No.17 Tahun 2024. Jumlah PNBP SDA pada tahun 2023 relatif kecil yakni sebesar Rp79.350, hal ini dikarenakan relatif percobaan diberlakukan PNBP SDA di PPS Bungus yang kemudian meningkat menjadi Rp140.138.395 pada tahun 2024. Sementara itu, PNBP Non SDA menunjukkan tren yang relatif stabil dengan pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PNBP Non SDA tercatat sebesar Rp1.337.254.763 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai Rp2.608.458.995 pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas pendapatan dari jasa-jasa pelabuhan seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa bongkar muat, dan pelayanan administratif lainnya yang tidak terkait langsung dengan ekstraksi sumber daya alam. Total PNBP gabungan (SDA dan Non SDA) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi peningkatan PNBP Non SDA yang stabil dan peningkatan PNBP SDA yang eksponensial pada dua tahun terakhir.

### Pendapatan per jenis usaha (P2)

Berdasarkan data tabel 2 terlihat bahwa terdapat variasi signifikan dalam kontribusi masing-masing jenis usaha terhadap total pendapatan. Usaha penangkapan ikan menempati posisi utama sebagai sumber pendapatan operasional utama yang didapat dari penjualan hasil tangkapan ikan dengan omset tahunan mencapai Rp93.220.245.000, diikuti oleh pengusaha BBM dengan kontribusi Rp82.742.400.000. Namun, dua komponen non-operasional menunjukkan dominasi yang lebih besar, yaitu nilai ekspor tuna yang mencapai Rp326.473.200.000 dan investasi sebesar Rp 293.949.882.937.

Kedua komponen ini menjadi penopang utama ekonomi PPS Bungus, yang mendominasi pendapatan dari aktivitas usaha langsung. Sementara itu, unit usaha seperti pabrik es, docking, dan rumah makan memberikan kontribusi yang relatif kecil, masing-masing hanya sebesar Rp216.000.000 dan Rp12.000.000 per tahun. Secara keseluruhan, struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di PPS Bungus sangat ditopang oleh aktivitas eksternal seperti ekspor dan masuknya investasi, sementara sektor produktif domestik seperti pengolahan (PT. DEMPO) dan unit usaha kecil masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.

### Gaji pegawai/karyawan di PPS Bungus (P3)

Gaji pegawai/karyawan (P3) di PPS Bungus secara umum berasal dari data penghitungan internal yang diperoleh melalui survei di lingkungan PPS Bungus. Data ini biasanya dikumpulkan melibatkan berbagai unit usaha dan jenis pekerjaan yang ada di lokasi tersebut, baik dari pegawai PPS, nelayan, nakhoda, tukang ojek, karyawan perusahaan seperti PT. Dempo, hingga pedagang kaki lima. Gaji/pendapatan pegawai/karyawan disajikan pada Tabel 3.

Pendapatan pegawai dan karyawan di PPS Bungus terlihat bervariasi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Pegawai PPS merupakan kelompok dengan jumlah populasi terbanyak yaitu 92 orang dan memiliki gaji rata-rata per bulan sebesar Rp5.678.164, sehingga total gaji per bulan mencapai Rp522.391.088 dan total pendapatan tahunan sebesar Rp6.268.693.056. Kelompok lainnya seperti

nelayan ABK, nakhoda, tukang ojek, karyawan PT. Dempo, karyawan *docking*, dan pedagang kaki lima juga memberikan kontribusi pendapatan yang bervariasi sesuai dengan jumlah populasi dan gaji rata-rata yang mereka terima.

Tabel 2. Pendapatan per jenis usaha (P2) di PPS Bungus Tahun 2025

No.	Jenis Usaha	Omset/bulan (Rp)	Omset/tahun (Rp)
1.	Usaha penangkapan	7.768.353.750	93.220.245.000
2.	PT. DEMPO (pengolahan)	352.500.000	4.230.000.000
3.	Pabrik es	18.000.000	216.000.000
4.	<i>Docking</i>	18.000.000,00	216.000.000
5.	Rumah makan	1.000.000,00	12.000.000
6.	Pengusaha BBM	6.895.200.000	82.742.400.000
7.	Nilai ekspor tuna	-	326.473.200.000
8.	Investasi	-	293.949.882.937
Total			801.059.727.937

Sumber: Wawancara diolah

Tabel 3. Gaji/pendapatan pegawai/karyawan (P3) di PPS Bungus Tahun 2025

No.	Jenis usaha	Jumlah populasi (orang)	Total gaji/bln (Rp)	Total gaji/thn (Rp)
1.	Pegawai PPS	92	522.391.088	6.268.693.056
2.	Nelayan ABK	36	108.000.000	1.296.000.000
3.	Nakhoda	4	20.000.000	240.000.000
4.	Tukang ojek	10	18.000.000	216.000.000
5.	Karyawan PT.Dempo	87	243.600.000	2.923.200.000
6.	Karyawan <i>docking</i>	15	30.000.000	360.000.000
7.	Pedagang kaki lima	5	12.000.000	144.000.000
Total			953.991.088	11.447.893.056

Sumber: Wawancara diolah

Hal ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan antar jenis usaha di PPS Bungus yang dipengaruhi oleh faktor jumlah pegawai dan tingkat gaji rata-rata yang berbeda. Sementara para tukang ojek dan pedagang kaki lima yang jumlah populasinya lebih kecil juga memberikan kontribusi yang lumayan terhadap total pendapatan, menandakan peran usaha kecil dalam struktur pendapatan di PPS Bungus.

### Kontribusi PPS Bungus

Data Tabel 4 menunjukkan PDRB perikanan menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kota Padang memberikan kontribusi yang terhadap ekonomi lokal, dengan nilai PDRB Perikanan Kota Padang mencapai Rp4.170.540.000.000 dan nilai ekonomi sebesar Rp815.256.218.383, yang menghasilkan kontribusi Pelabuhan sebesar 19,55 %. PPS Bungus memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Padang sebesar 19,55%. Angka ini menandakan bahwa perikanan adalah salah satu penopang utama ekonomi lokal, mencerminkan adanya aktivitas penangkapan, budidaya, pengolahan, dan perdagangan hasil perikanan yang intensif. Lokasi strategis Kota Padang sebagai kota pesisir, dengan akses langsung ke sumber daya laut, menjadi faktor kunci dalam tingginya kontribusi ini (Subagio & Setiawan, 2020; Dwiarti *et al.*, 2021).

Namun, jika dibandingkan dengan total PDRB Kota Padang yang mencapai Rp84.182.560.000.000, kontribusi PPS Bungus secara keseluruhan terhadap PDRB total kota masih relatif terbatas, yaitu 0,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perikanan memiliki nilai

ekonomi yang besar secara nominal, ada sektor-sektor lain yang lebih dominan dalam membentuk total PDRB Kota Padang, seperti sektor perdagangan, jasa, atau industri. Kontribusi PPS Bungus terhadap PDRB Perikanan Nasional sebesar 0,28 % dari PDRB Nasional, menunjukkan bahwa sektor perikanan, meskipun vital bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal, memiliki pangsa yang relatif kecil di tingkat makro ekonomi nasional secara umum.

Tabel 4. Kontribusi Nilai Ekonomi dan PDRB tahun 2025

No.	PDRB	Nilai PDRB (juta)	Nilai Ekonomi di PPS (juta)	Kontribusi PPS (%)
1.	PDRB Perikanan Kota Padang	4.170.540	815.256	19,55
2.	PDRB Total Kota Padang	84.182.560	815.256	0,97
3.	PDRB Perikanan SUMBAR	13.752.810	815.256	5,93
4.	PDRB Total Prov SUMBAR	332.936.440	815.256	0,24
5.	PDRB Nasional Perikanan	292.559.100	815.256	0,28

Sektor perikanan sering menghadapi tantangan dalam hal manajemen sumber daya, teknologi, dan pemasaran, yang dapat membatasi kontribusinya terhadap PDRB total (Siahaan & Syah, 2017). Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berfokus pada inovasi, hilirisasi, dan keberlanjutan sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian secara lebih signifikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Aktivitas ekonomi di PPS Bungus meliputi berbagai usaha seperti warung makan, kelontong, nelayan, docking kapal, pengolahan, hingga ojek dengan total pendapatan tahunan sebesar 815,26 miliar dan PPS Bungus berkontribusi signifikan terhadap PDRB Perikanan Kota Padang (19,55%), meskipun kontribusinya terhadap PDRB total kota masih rendah (0,97%). Adapun saran dari penelitian ini adalah perlu upaya-upaya peningkatan aktivitas ekonomi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sehingga kontribusi pelabuhan terhadap ekonomi wilayah relatif meningkat dengan peningkatan infrastruktur Pelabuhan untuk menjamin stabilitas produksi dan nilai produksi, dan upaya integrasi Pelabuhan perikanan dengan berbagai sektor ekonomi di wilayah Kota Padang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini dan pihak lain yang membantu dalam penelitian serta penulisan ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimina, N., Sara, L., Arami, H. and Mustafa, A., 2022. Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan bagi Nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4): 29- 134. DOI: 10.29303/jpmipi.v5i4.2310.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *PDRB Sektor Perikanan*. KKP: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Sumatera Barat dalam Angka 2023*. SUMBAR: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Kota Padang dalam Angka 2014*. Padang: BPS.
- Dwiarti, R., Yuliando, Y., & Ardiansyah, A. 2021. Analisis Potensi Ekonomi Sektor Perikanan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah Pesisir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45-56. DOI: <https://share.google/fxCpqc0wWZxgbUXA>.

- Fazri, K. Solihin, I. Mustaruddin. 2021. Fasilitas dan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi ACEH. *Jurnal Albacore*. 5(1).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Kusuma, G., 2015. Rekonstruksi Geometri Akuifer Kawasan Pesisir Bungus, Sumatra Barat. RISET Geologi dan Pertambangan, 25(1): 1-1. DOI: <https://share.google/eMAezIJjdKAd1qaFc>.
- Manik, RR. Handoco, E. dan Arleston, J. 2021. Variasi Hasil Tangkapan Ikan dari Perairan Samudera Hindia, yang didaratkan di PPN Sibolga pantai barat Sumatera tahun 2019. *Jurnal TRITON* 17(2): 68 – 76. DOI: <https://doi.org/10.30598/TRITONvol17issue2page68-76>.
- PPS Bungus. 2020. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020.
- PPS Bungus. 2021. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021.
- PPS Bungus. 2022. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2022.
- PPS Bungus. 2023. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023.
- PPS Bungus. 2024. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024.
- Putra, F. H., H. M. Ani, dan W. Hartanto. 2018. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2012-2016. *J. Pendidikan Ekonomi*. 12(1): 71-74
- Sembiring, E. Sitanggang, EP dan Mandagi, EF. 2024. Kontribusi Perikanan Pukat Cincin yang Berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa terhadap PDRB Kota Manado di masa Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 9(2): 53-63. DOI:<https://doi.org/10.35800/jitpt.9.2.2024.51517>.
- Siahaan, S., & Syah, A. N. D. 2017. Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian Regional dan Nasional. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 164-177.
- Subagio, A., & Setiawan, K. 2020. PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Indikator Keberlanjutan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 1-12. DOI: <https://share.google/bZesKPcUfKYwr0oby>.
- Suherman, A. and Mudzakir, A.K., 2022. Performance of Bajomulyo-Pati Coastal Fisheries Port (CFP) on the regional economy. *ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*. 9(2): 209-223. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2022.009.02.05>.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan ke- 21*. Bandung: Alfabeta.
- Suprapto, A. 2023. Dinamika Produksi Perikanan Tangkap dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya di Perairan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan*, 5(2): 112-130.
- Stanford, R., Haluan, J., Wirawan, B., Bengen, D.G. and Febriamansyah, R., 2014. Strategi mengatasi kemiskinan untuk anak buah ‘bagan’di Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1): 1-10.
- Wahyuni S, Triarso I, Kurohman F. 2018. Analisis pengembangan fasilitas pelabuhan yang berwawasan lingkungan (*ecoport*) di Pelabuhan Nusantara Pekalongan. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 7(2):52–57.